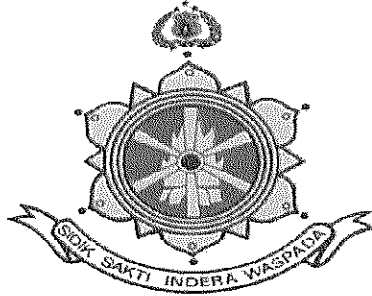
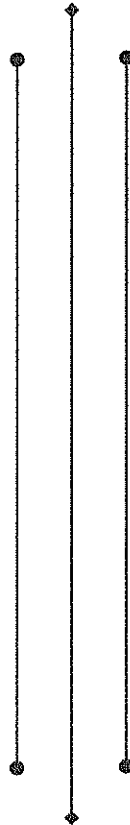


**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWER SYSTEM (WBS)
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TRIWULAN I T.A. 2017**



JAKARTA, 31 MARET 2017



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN I TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/I/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System (WBS)*.

2. EVALUASI

Whistle Blower System (WBS) adalah aplikasi yang disediakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Polri. *Whistle Blower* merupakan saksi pelapor atau bahkan pengungkap fakta dimana sangat besar perannya untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih besar.

Dari data yang ada, Dittipidkor Bareskrim Polri tahun 2016 sampai dengan sekarang, sedang menangani personel Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai berikut:

1. AKBP Anisahada dugaan korupsi pemerasan terhadap tersangka (P-21)

2. IrjenPol Joko Susilo Dugaan tindak pidana korupsi (Limpah KPK)
3. Kopol Sarjono dkk dugaan korupsi perbuatan secara bersama-sama atau turut serta dengan AKBP Pentus Napitu melakukan TPK dan TPPU dalam penanganan perkara Narkoba di Bandung. (P-21)
4. Kopol Dedy Setyawan Yunus, SIK dugaan korupsi berupa menerima suap dan atau hadiah dan atau janji yang dilakukan penyidik (P-21)
5. Primkoppol Korlantas Polri, dugaan korupsi pengadaan TNKB dan TCKB Roda 4/lebih oleh Korlantas Polri T.A 2011. (Sidik)
6. AKBP Brotoseno, SIK dugaan korupsi berupa menerima suap dan atau hadiah dan atau janji yang dilakukan penyidik. (P-21)
7. AIPTU Abd. Haris dan Brigadir Jarodi, dugaan korupsi bersama sama atau turut serta dalam melakukan TPK dan TPPU penanganan kasus Narkoba. (P-21)

Mengingat pentingnya sistem pengaduan ini, maka Dittipidkor Bareskrim Polri pada tahun ini telah mengeluarkan akses WBS ini dan dapat dibuka oleh masyarakat melalui Website Dittipidkor.

3. KESIMPULAN

Dittipidkor Bareskrim Polri akan menindaklanjuti WBS secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kerahasiaan serta keamanan dari pelapor tetap terjaga.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 31 Maret 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

DIREKTUR

D. AKHMAD WYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

